

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan secara etimologis berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002).

Secara harfiah Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2008, miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standar dan tingkat penghasilan dan ekonominya rendah. Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemiskinan dapat dicirikan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berkaitan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara (Perpes No 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari

tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Amelia, 2012).

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004).

Adapun ayat Al-Qur'an menerangi masalah kemiskinan yaitu :

QS. Al-Isra [17/50]: 26

تَنْذِيرًا تَبَدَّرْ وَلَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَا وَآتِ

Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Makna dari ayat tersebut ialah agar kita sesama manusia saling berbagi karena setiap manusia memiliki hak masing-masing dan janganlah kamu suka menghamburkan hartamu dengan tidak baik karena didalam hartamu ada hak orang yang harus dikeluarkan.

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2000) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut

mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan. Menurut World Bank (2015), dalam definisi kemiskinan ialah kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standard hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada Tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu

melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Simatupang, 2003).

Menurut Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus

ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Istilah kemiskinan selalu melekat dan begitu populer dalam masyarakat yang sedang berkembang. Istilah itu sangat mudah diucapkan tetapi begitu mudah untuk menentukan yang miskin itu yang bagaimana siapa yang tergolong penduduk miskin. Untuk memberi pemahaman konseptual, akan dikemukakan dua pengertian kemiskinan yaitu:

1. Secara kualitatif, definisi kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia, dan

2. Secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim “tidak berharta benda” (Mardimin, 1996).

2.1.1 Indikator Kemiskinan

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru (2014) memberikan rumusan yang konkrit sebagai indikator utama kemiskinan adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya

2.1.2 Karakteristik Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers (2006) memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri.

Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya menurut Kartasasmita (1993), umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Berdasarkan kondisi kemiskinan, kemiskinan memiliki 5 bentuk.

Adapun bentuk-bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004) :

1. Kemiskinan absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif. Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negara-negara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya (Jarnasy, 2004).

4. Kemiskinan Situasional atau kemiskinan natural.

Kemiskinan situasional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.

5. Kemiskinan kultural.

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

Setelah dikenal karakteristik kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumberdaya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Harry (2007) mengemukakan terdapat dua jenis kemiskinan, yaitu :

1. Kemiskinan yang bersifat kronis (*chronic poverty*)

Ciri dari kemiskinan ini diantaranya adalah sangat terbatasnya infrastruktur transportasi yang menunjukkan bahwa penduduk miskin yang tinggal di daerah terpencil, sering mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan, serta tidak banyak memiliki peluang untuk memperoleh pendidikan. Kemiskinan jenis ini biasanya akan menghasilkan keturunan yang miskin juga, sehingga jenis ini sering dikaitkan dengan kemiskinan antar generasi.

2. Kemiskinan yang bersifat sementara (*transient poverty*)

Kemiskinan yang disebabkan karena suatu kejadian atau perkara yang mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Ketika kondisinya membaik, maka mereka akan dapat hidup normal dan lebih baik.

Menurut Chambers (1998) dalam Chriswardani (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi sebagai ketidak beruntungan (*disadvantages*) yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain:

1) Kemiskinan (*Proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2) Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

4) Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5) Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang

jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Moeljarto (1995) mengemukakan tentang *Poverty Profile* sebagaimana berikut: Masalah kemiskinan bukan saja masalah *welfare* akan tetapi mengandung enam buah alasan antara lain :

- a) Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan.
- b) Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi.
- c) Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak berdaya.
- d) Kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas.
- e) Tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar.
- f) Adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.
- 2) Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
- 3) Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur.
- 4) Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (*slum area*).
- 5) Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan di atas tidak memiliki sifat mutlak (absolut) untuk dijadikan kebenaran universal terutama dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ataupun terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atas hanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak diidentifikasi atau diukur.

2.1.2.1 Pengertian Rumah Tangga Miskin

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur berarti pembiayaan keperluan apabila pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2013).

Rumah tangga miskin adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran (untuk konsumsi rumah tangga) per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan. Penekanan pengukuran penduduk miskin adalah pada penentuan rumah tangga miskin karena pengumpulan informasi pengeluaran diakumulasikan pada unit rumah tangga bukan unit individu (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2013).

Mengemukakan ciri-ciri rumah tangga miskin adalah sebagian besar rumah tangga hanya mempunyai satu orang pekerja, sebagian besar tempat tinggal rumah tangga miskin belum memenuhi persyaratan kesehatan yang ada, sebagian besar memiliki lahan relatif kecil. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga sebagian masih rendah, rata-rata jam kerja masih rendah jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin status pekerjaan 70% adalah petani (Badan Pusat Kota Pekanbaru, 2014).

2.1.2.2 Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan semakin tingginya kebutuhan lahan akan menimbulkan gejala-gejala sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas. Kemiskinan dan kebutuhan lahan yang tumbuh diperkotaan juga akan menimbulkan adanya kawasan yang disebut sebagai kawasan kumuh. Kawasan atau pemukiman kumuh identik dengan tempat tinggal bagi masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah, sarana prasarana yang tidak memadai, serta lingkungan yang kumuh serta rawan terjadi bencana seperti terjadinya kebakaran, banjir, dan terjangkitnya penyakit endemik pada masyarakat di kawasan itu. Diperkirakan luas pemukiman kumuh akan terus bertambah dengan kondisi lingkungan yang sama atau semakin memburuk dan juga berdampak terhadap kehidupan perekonomiannya.

Kehidupan ekonomi yang berada dalam sektor informal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat miskin penghuni pemukiman kumuh dan semuanya itu mengacu pada kebudayaan kemiskinan yang merupakan pedoman bagi kehidupan mereka. Di antara ciri-ciri kebudayaan kemiskinan yang menjadi model bagi pola kehidupan ekonomi informal adalah tidak atau kurang efektifnya partisipasi orang miskin dalam pranata-pranata yang berlaku dalam masyarakat luas, dan karena itu orang miskin tidak mempunyai akses untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia melalui pranata-pranata tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan ke seluruh sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkannya tingkat kemiskinan. Untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (Fajriawati, 2015).

2.2 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Setiap permasalahan yang timbul pasti karna ada faktor yang mengiringnya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Hudyana (2009) yaitu :

1) Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

2) Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan

karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

3) Pendidikan yang Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

4) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

5) Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6) Kurangnya Perhatian dari Pemerintah

Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat

memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

Menurut Kuncoro (2001) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Kemiskinan terjadi disebabkan oleh banyak faktor, Bank Dunia (2003) merumuskan bahwa penyebab kemiskinan adalah :

1. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal
2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana
3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor
4. Adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung
5. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern)

6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat
7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya
8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*)
9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

2.2.1 Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga, dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi. Pembagian di atas berkaitan dengan status, pendidikan dan keterampilan serta jenis pekerja seseorang namun sifatnya sangat relatif (Prayuda, 2014).

Menurut Yudhohusodo dalam Poniwati (2008) tingkat pendapatan seseorang dapat digolongkan dalam 4 golongan yaitu :

- a. Golongan yang berpenghasilan rendah (*Low income group*) yaitu pendapatan rata-rata dari Rp 150.000 perbulan.

- b. Golongan berpenghasilan sedang (*Moderate income group*) yaitu pendapatan rata-rata Rp 150.000 – Rp 450.000 perbulan.
- c. Golongan berpenghasilan menengah (*Midle income group*) yaitu pendapatan rata-rata yang diterima Rp 450.000 – Rp 900.000 perbulan.
- d. Golongan yang berpenghasilan tinggi (*High income group*) yaitu rata-rata pendapatan lebih dari Rp 900.000 perbulan.

2.2.2 Jenis Pekerjaan

Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan tolok ukur produktivitas kegiatan, antara lain adalah status kerja, jenis pekerjaan, jumlah hari kerja, dan jam kerja. Beberapa indikator yang dicoba dikaji ternyata tidak semua menunjukkan adanya kaitan yang jelas antara kegiatan kepala rumah tangga dengan kemiskinan. Variabel lain yang bisa menerangkan kemiskinan dengan pekerjaan adalah jumlah pekerja dalam rumah tangga dan jumlah jam kerja total dari anggota rumah tangga yang bekerja tersebut. Bila jam kerja total seluruh anggota rumah tangga dibagi jumlah yang bekerja pada rumah tangga tersebut maka tampak jelas bahwa rumah tangga miskin di pedesaan maupun di perkotaan relatif kurang produktif dibandingkan dengan rumah tangga dengan status ekonomi yang lebih baik karena rata-rata jam kerja per orang meningkat sesuai dengan peningkatan status ekonomi (Faturocman dan Molo, 1994).

Jenis pekerjaan utama dalam rumah tangga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan rumah tangga. Jenis pekerjaan utama dalam rumah

tangga merupakan faktor penentu besarnya pendapatan (dan pengeluaran) yang diterima oleh rumah tangga (Gounder, 2005). Menurut Butar (2008) pekerjaan utama kepala rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan suatu rumah tangga, hal ini dikarenakan tiap jenis pekerjaan memiliki tingkat upah yang berbeda-beda. Pada sektor pertanian tingkat upah minimum yang akan diterima oleh pekerjanya akan lebih rendah dibandingkan pada sektor lain (seperti: industri) dan di Indonesia mayoritas kepala rumah tangga miskin cenderung bekerja pada sektor pertanian baik dalam sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan maupun perikanan.

Semua pekerjaan yang digeluti sebagian besar adalah sektor informal, yaitu sebuah pekerjaan yang tanpa ikatan, tidak tetap, dinamis, diatur sendiri. Pekerjaan tersebutlah yang mampu diraih. Pekerjaan ini mengandung kerentanan yang tinggi. Pada satu situasi pekerjaan ini tidak menghasilkan uang, keluarga akan dipertaruhkan (Kertati, 2013).

Hasil-hasil penelitian cenderung menunjukkan hubungan yang positif antara kemiskinan dengan jumlah anggota rumah tangga. Tentu saja hal ini terjadi bila banyak anggota rumah tangga tidak produktif. Produktivitas yang rendah dapat berasosiasi, antara lain, dengan jam kerja yang rendah (setengah menganggur), terutama di kalangan penduduk usia muda, tingkat pendidikan rendah yang menyebabkan terjadi segmentasi pekerja pada pekerjaan berpenghasilan rendah juga (Faturachman dan Molo, 1994).

2.2.3 Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga merupakan indikasi dalam menentukan miskin atau tidaknya suatu rumah tangga. Semakin besar jumlah anggota rumah tangga berarti semakin besar jumlah tanggungan dan akan semakin besar pendapatan yang dikeluarkan untuk biaya hidup. Sehingga menurut masyarakat miskin, jumlah anggota keluarga yang banyak akan mengakibatkan kondisi menjadi semakin miskin.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu akibat. Dalam hal ini rumah tangga yang tadinya tidak miskin maupun yang miskin terbebani antara lain oleh jumlah anggota rumah tangga dan tidak produktif. Bila pendapatan rumah tangga tidak meningkat sejajar dengan beban itu maka rumah tangga itu akan menjadi miskin atau semakin miskin. Inilah salah satu penjelasan keterkaitan antara rumah tangga miskin dengan besarnya anggota rumah tangga tersebut.

Jumlah tanggungan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga. Jumlah tanggungan dalam rumah tangga ditunjukkan dengan besarnya jumlah anggota rumah tangga yang tidak bekerja berkorelasi negatif dengan konsumsi dan pendapatan perkapita tiap anggota keluarga (Lanjow dan Ravallion, 1995). Menurut Mok T.Y (2007) jumlah tanggungan dalam rumah tangga (baik anak-anak, anggota usia produktif

yang tidak bekerja dan lansia) kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi kemiskinan rumah tangga.

Menurut Rivani (2003) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga mempengaruhi kemiskinan. Alasan jumlah tanggungan keluarga yang banyak, dapat disebabkan oleh beberapa penyebab antara lain, banyak anak, ada anggota keluarga yang tidak produktif (usia lanjut atau alasan lain) dan kesulitan memperoleh pekerjaan bagi anggota keluarga yang sebenarnya sudah mencapai usia produktif.

2.2.4 Konsep Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi daya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan menurut Amelia (2012) adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan dibagi tiga, yaitu :

1. Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi jenjang pendidikan formal:
 - a. Pendidikan Dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS).
 - b. Pendidikan Menengah, merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), serta bentuk lain yang sederajat.
 - c. Pendidikan Tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana.
2. Pendidikan Non Formal, adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan dengan terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal.
3. Pendidikan Informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakuisama dengan pendidikan formal maupun informal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Todaro dalam bukunya *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (2006) menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan suatu bangsa (masyarakat) adalah rendahnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kesempatan memperoleh pengetahuan. Pada rumah tangga, tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh kepala rumah tangga merupakan hal sangat vital. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghasilan (Simanjuntak, 1985) dan kepala rumah tangga merupakan sumber penghasilan utama dalam rumah tangga. Sehingga pendidikan yang telah ditempuh oleh kepala rumah tangga menjadi faktor yang penting dalam menentukan kesejahteraan rumah tangga. Menurut Grouder (2005) pencapaian tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang lebih tinggi akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, sehingga pendidikan merupakan cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Di sektor informal

seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

2.2.5 Usaha Sampingan

Menurut terminologi, usaha sampingan adalah sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan di waktu senggang atau kosong yang biasanya untuk menambah penghasilan di samping pekerjaan utama sehari-hari. Ada banyak jenis pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai usaha sampingan, antara lain : beternak ikan, bisnis online, berjualan tanaman hias, beternak ayam, dan lain sebagainya.

Jadi dengan kata lain kerjaan sampingan merupakan suatu jenis bisnis atau pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang pada luar pekerjaan aslinya yg selama ini sudah digeluti dan di kerjakan.

2.3 Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002). Implementasi kebijakan dipandang

dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (1975) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditetapkan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implemetasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno, 2002).

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui

kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan nonmaterial.

Korten (dalam Hikmat, 2006) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat:

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas.
2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi.
3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal. Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowermen*). Model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan.

Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada Tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain :

1. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok

Program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.

2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin

Program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasnya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat atau keluarga miskin.

3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin.

4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.

5. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Program ini bertujuan untuk melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi.

Sementara itu, Program Kompensasi (*Compensatory Programme*) bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk menolong penduduk yang secara langsung terkena dampak kebijakan penyesuaian struktural ekonomi (*economic structural adjustment*). Kebijakan yang berlangsung secara bersamaan ini juga menimbulkan eksekusi bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (Haryono, 1999). Adapun program penanggulangan kemiskinan merupakan program intervensi pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat.

Sehubungan dengan peran pemerintah dalam setiap program pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik itu, Sumodiningrat (1999) menegaskan bahwa: Program pemberdayaan masyarakat dirancang oleh pemerintah untuk memecahkan tiga masalah utama pembangunan yakni pengangguran, ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat tak lain adalah kebijaksanaan memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi maraknya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk

mengatasi masalah mereka sendiri dan tidak untuk justru menekan dan mendesak mereka ke pinggir-pinggir atau ke posisi-posisi ketergantungan.

Sementara itu Rondinelli, (1983) mengemukakan ada tiga strategi dasar program yang bertujuan untuk membantu penduduk miskin yakni:

1. Bantuan disalurkan ke tempat dimana mayoritas orang miskin hidup, melalui program pembangunan desa terpadu atau proyek produksi pelayanan yang berorientasi pada penduduk desa.
2. Bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-orang miskin melalui program kebutuhan dasar manusia.
3. Bantuan dipusatkan pada kelompok yang mempunyai ciri sosio ekonomi yang sama yang mendorong atau mempertahankan mereka untuk terus berkubang di dalam lingkaran kemiskinan melalui proyek yang dirancang bagi masyarakat tertentu.

2.3.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Mengingat angka kemiskinan Indonesia yang semakin meningkat, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Adapun program-program yang diluncurkan oleh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), serta subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Ada pula penyediaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Askeskin/Jamkesmas, dan program kompensasi dan bersifat sementara.

Dalam periode 2010-2014, program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi Klaster I, Klaster II, Klaster III, dan Klaster IV dengan tujuan agar lebih sinergis. Efektivitas program juga ditingkatkan dengan membuat kerangka Master Plan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan (MP3KI) untuk mencapai tingkat kemiskinan 4-5 persen pada Tahun 2025. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di Tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009 (Patmikumalasari, 2014).

Pada pemerintahan Presiden Jokowi pun membuat beberapa program. Adapun program-program tersebut di antaranya melalui kebijakan pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar, peningkatan efektivitas program Bidik Misi, penataan asistensi sosial (Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu Indonesia Pintar/KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera/KKS), program selanjutnya seperti, perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial, serta integrasi data kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial.

Selain pemberdayaan, program-program untuk mengurangi beban penduduk miskin dan rentan juga akan terus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dirasa cukup berhasil misalnya, bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) akan lebih diperluas cakupannya.

Program-program lainnya yang akan dilanjutkan seperti, transformasi beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) menjadi bantuan pangan, serta keberlanjutan subsidi energi dan pupuk, bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS, bantuan pendidikan melalui KIP, bantuan sosial di luar sistem keluarga, dan jaminan sosial yang lain diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan.

Guna memperkuat program-program pengentasan kemiskinan tersebut, Pemerintah juga mendorong kebijakan kemiskinan terkait revolusi mental diantaranya melalui:

1. Redesign program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat,
2. Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, serta
3. Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan di berbagai Negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan daerah dan periode waktu yang berbeda pula, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sanadjihitu Sangadji, dkk (2015) yang berjudul *“Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo”*. Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dan mengetahui program penanggulangan kemiskinan yang masih belum optimal dan tepat sasaran.

Model regresi yang digunakan adalah metode interview terhadap seluruh informant.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mita Natalia (2014) yang berjudul *“Kajian Kemiskinan Pesisir Di Kota Semarang”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur dan kepemilikan modal serta mengetahui bentuk kemiskinan yang terjadi.

Model regresi yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gatot Winoto (2006) yang berjudul *“Pola Kemiskinan Di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kemiskinan yang ada di wilayah penelitian.

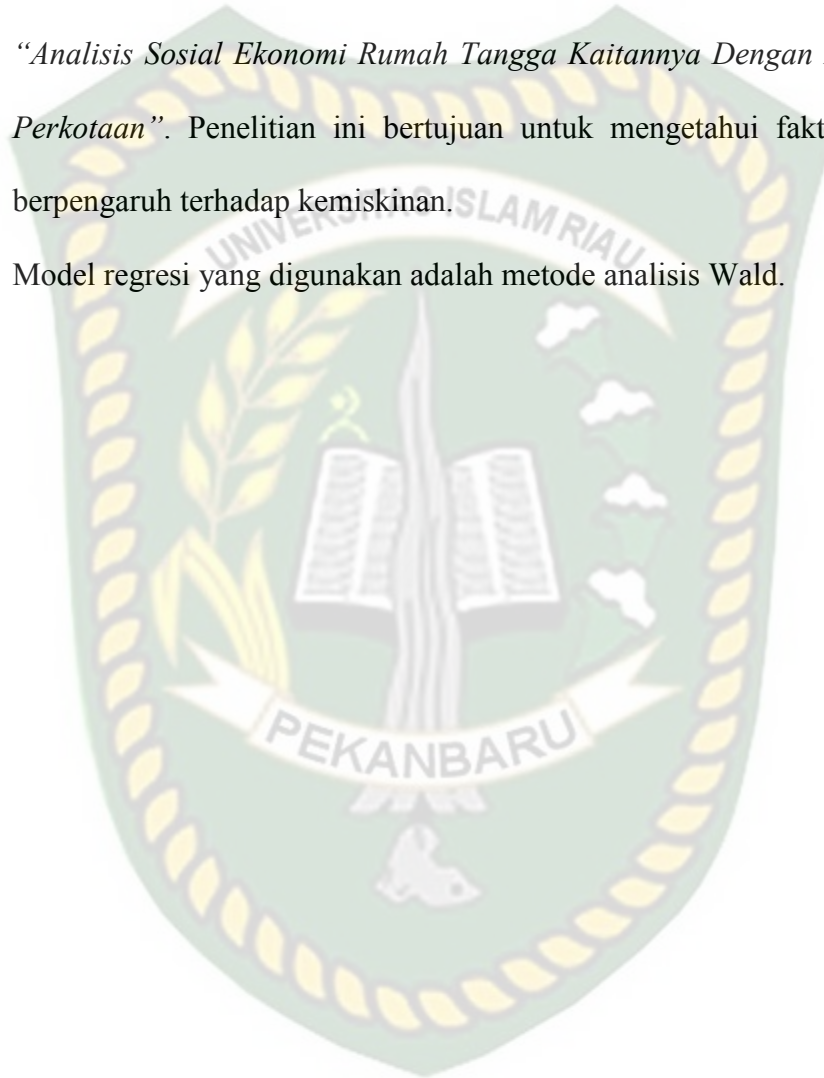
Model regresi yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Takdir (2013) yang berjudul *“Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Di Kabupaten Aceh Barat Daya”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui garis kemiskinan dan faktor penyebab terjadinya kemiskinan.

Model regresi yang digunakan adalah metode survey yaitu berupa kuisisioner dan wawancara.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sawaluddin Naibaho (2008) yang berjudul *“Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Kaitannya Dengan Kemiskinan Di Perkotaan”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan.

Model regresi yang digunakan adalah metode analisis Wald.



Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Sanadjihitu Sangadji (2015)	Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	Menganalisis dan menjabarkan karakteristik kemiskinan serta kebijakan dan program penanggulangannya.	1. Karakteristik Kemiskinan 2. Kebijakan dan Program Penanggulannya	Interview seluruh informant	Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan : 1. Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo lebih bersifat kultural baik di wilayah luar maupun urban (perkotaan) 2. Pelaksanaan program dan penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini masih belum optimal dan tepat sasaran.
2	Mita Natalia (2014)	Kajian Kemiskinan Pesisir Di Kota Semarang	Kampung Nelayan Tambak Lorok	1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan 2. Mengetahui bentuk kemiskinan yang terjadi.	1. Faktor terjadinya kemiskinan 2. Bentuk kemiskinan yang terjadi	Kualitatif	Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa faktor kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur dan kepemilikan modal dan teknologi mempengaruhi terjadinya kemiskinan di kawasan Tambak Lorok, sehingga bentuk kemiskinan yang terjadi di kawasan Tambak Lorok dikategorikan sebagai bentuk kemiskinan natural.

No	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
3	Gatot Winoto (2006)	Pola Kemiskinan Di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang	Kelurahan Dompok Kota Tanjung Pinang	Mengetahui pola kemiskinan dan pemukiman nelayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik masyarakat 2. Pola kemiskinan 3. Faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan 	Kualitatif	Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pola kemiskinan di perumahan nelayan Kelurahan Dompok adalah (1) kemiskinan subsistensi, dicirikan oleh pendapatan masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok yang rendah, kondisi perumahan yang tidak layak dan minimnya fasilitas air bersih (b) kemiskinan perlindungan, dimana lingkungan permukiman nelayan yang buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi) dan tidak adanya jaminan atas hak pemilikan tanah (c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk (rendah), terbatasnya keahlian yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan.
4	Arif Takdir (2013)	Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Di	Kabupaten Aceh Barat Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui seberapa besar garis kemiskinan rumah tangga 2. Mengetahui faktor-faktor penyebab 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garis kemiskinan rumah tangga 2. Faktor penyebab kemiskinan 	Survey (kuisisioner dan wawancara)	Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Aceh Barat Daya disebabkan oleh dua faktor, yaitu normatif – teologis dan struktural – sosiologis. Garis kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat adalah Rp 563.890,34. Artinya masyarakat yang

No	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
			Kabupaten Aceh Barat Daya	kemiskinan			berpendapatan/pengeluaran di bawah Rp 563.890,34 dianggap miskin dan bagi yang pengeluarannya di atas Rp 563.890,34 digolongkan tidak miskin.
5	Sawaluddin Naibaho (2008)	Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Kaitannya Dengan Kemiskinan Di Perkotaan	Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar	Mengetahui sosial ekonomi rumah tangga yang berkaitan dengan kemiskinan di perkotaan.	1. Kepemilikan rumah 2. Pendidikan kepala rumah tangga 3. Sumberdaya ekonomi rumah tangga 4. Jumlah anggota rumah tangga	Analisis Wald	Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kepemilikan rumah, lama perkawinan, pendidikan kepala rumah tangga, sumberdaya ekonomi rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap miskin atau bukan miskinnya rumah tangga di perkotaan.